

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, bahwa mengenai 10 kebijakan dalam peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor 1 tahun 2012 pada pasal 3, dalam hasil audit kesesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten kulon progo tahun 2018 terdapat 3 kebijakan yang belum terealisasi dan 7 kebijakan yang belum terealisasi secara optimal, yang dilihat dari hasil laporan .

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, bahwa implementasi Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah sudah cukup baik, namun ada beberapakonsep penting di dalam pasal peraturan daerah tersebut masih belum jelas dan sulit untuk diimplementasikan di lapangan.

Alasan adanya rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon, karena menurut PT. Angkasa Pura I, keadaan terkini Bandara Adisutjipto sudah melebihi kapasitas (*over capacity*) untuk menampung pertumbuhan penumpang, pesawat, bagasi dan kargo. Dalam pertahun pertumbuhan penumpang dihitung rata-ratanya mencapai 16%. Sedangkan apabila diamati dari kekuatan daya tampung dari Bandara Adisutjipto hanya mampu menerima penumpang sebanyak 2,3 juta per tahun. Di tahun 2015 jumlah penumpang mencapai 6,3 juta penumpang. Semakin besar jumlah

penumpang membuat Bandara Adisutjipto perlu digantikan dengan Bandara NYIA untuk dapat menampung 15 juta penumpang per tahun serta 300 penerbangan per harinya

Bentuk pembangunan bandara juga melanggar Amdal karena Analisa mengenai dampak lingkungan yang merupakan salah satu cara pengendalian yang sangatlah efektif. AMDAL pada hakekatnya yang merupakan bentuk penyempurnaan suatu proses dalam perencanaan proyek pembangunan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek-proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan pemahaman AMDAL. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pembangunan yang berwawasan dan memperhatikan lingkungan, yaitu lingkungan yang harus diperhatikan sejak awal mulai pembangunan itu harus direncanakan sampai pada operasi pembangunan tercapai hal itu yang sangat berbanding terbalik dengan adanya proses pembangunan bandara yang kurang memperhatikan peneraan Amdal karena lahan bandara sebagian besar berdiri di wilayah atau area lahan persawahan yang dimana itu salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak dari pembangunan Bandara NYIA, Dalam hal ini, manajemen yang efektif haruslah sangat memenuhi kepentingan jangka pendek individu dan tujuannya.

Dalam proses pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta tidak terlepas dari perlawanan dan gugatan dari warga setempat yang merasa dirugikan. Sebelumnya masyarakat setempat telah memenangkan gugatan di

PTUN, kemudian pihak pemerintah mengajukan kasasi dan memenangkan gugatan. Dengan bermodalkan hal tersebut pemerintah terus berusaha melanjutkan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Pemerintah sendiri menyiapkan tiga skema ganti untung yaitu pembayaran tunai, relokasi dan pemberian tanah PAG ke warga terdampak.

Angkasa Pura memiliki sistem mitigasi bencana pembangunan NYIA. Mitigasi , dengan pembangunan bandara dengan ketinggian tertentu di atas permukaan laut. “Desain untuk memitigasi dampak tsunami, bangunan lantai satu itu ketinggian sembilan meter,” kata Israwadi, *Corporate Secretary Angkasa Pura -I*.

Pemerintah, telah menunjuk para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), UGM, bahkan Jepang, untuk mengantisipasi dampak tsunami dengan skala besar serta melakukan mitigasi bencana. Salah satu upaya mitigasi, katanya, dengan membangun lantai terminal bandara rentang ketinggian mencapai delapan meter. Tujuannya, agar para penumpang bisa naik saat tsunami.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan temuan-temuan hasil penelitian ada beberapa saran atau masukan yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam pembangunan bandara tersebut. Selain itu juga sekiranya menjadi acuan atau bahan evaluasi kedepanya dalam

menjalankan suatu pembangunan di suatu wilayah. Adapun beberapasaran atau masukanya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah atau instansi terkait dalam menjalankan kebijakan suatu program pembangunan nasional di suatu wilayah, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dan rencana yang matang. Hal tersebut berkaitan dengan AMDAL, baik sebelum atau sesudah dilakukanya pembangunan itu, serta dampak sosial yang ditimbulkanya.
2. Alih fungsi lahan pertanian perlu diperhatikan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan, mengingat sector pertanian yang semakin sempit dan sedikit. Hal itu berkaitan dengan ketersediaan pangan nasional. Selain itu juga lahan yang dijadikan tempat berdirinya bangunan perlu adanya peninjauan ulang, Apakah tanah atau lahan itu produktif atau tidak.
3. Pemerintah atau instansi terkait perlu mengadakan ganti rugi yang pas dan sesuai kepada masyarakat terdampak Keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan ganti rugi kepada mereka yang terdampak juga penting.
4. Melibatkan masyarakat terdampak pembangunan dari mulai tahap-tahap pembangunan ataupun setelah pembangunan selesai. Memprioritaskan masyarakat terdampak, dalam hal ketenagakerjaan, tentunya dengan disesuaikan dengan potensi dan keahlian SDM-nya.
5. Masyarakat khususnya daerah pedesaan perlu adanya sikap dan sifat kedewasaan dalam menerima kebijakan pemerintah, dan ikut aktif dalam membuat dan mengontrol jalanya suatu kebijakan.

6. Masyarakat terdampak perlu adanya saling kerjasama antar warga dan pemerintah untuk menemukan solusi terbaik. Bisa dengan jalan musyawarah, mediasi, dan sebagainya.
7. Pemahaman mengenai suatu peraturan yang termuat dalam peraturan Perundang-undangan (UU No 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum) dan peraturan perundang-undangan yang lainnya harus dipahami bersama, khususnya masyarakat.
8. Pembangunan yang dilaksanakan harus berlandaskan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan bersama, khususnya bagi masyarakat terdampak.